

Rutan Praya Ikuti Sosialisasi Pedoman Uji Kompetensi JFT untuk Tingkatkan Profesionalisme Petugas Pemasarakatan

Syafruddin Adi - LOMBOKTENGAH.GO.WEB.ID

Dec 12, 2024 - 17:30



LOMBOK TENGAH, NTB – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Praya menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai melalui keikutsertaannya dalam Sosialisasi Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (JFT) Pembina Keamanan Pemasarakatan dan

Pengaman Pemasarakatan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan ini dilaksanakan serentak pada Kamis (12/12) menyusul terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-39.OT.02.02 Tahun 2024.

Dalam kegiatan tersebut, Rutan Praya diwakili oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), Gusatar Marza, bersama 12 petugas lainnya, terdiri dari 3 JFT Pembina Keamanan Pemasarakatan dan 9 JFT Pengaman Pemasarakatan.

Ali Andra Harahap, staf Bidang SDM Direktorat Jenderal Pemasarakatan, memaparkan secara rinci persyaratan dan tahapan uji kompetensi yang akan dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan Agustus.

"Kami memberikan gambaran lengkap mengenai dokumen yang harus dilampirkan, jadwal pelaksanaan, hingga tahapan ujian yang harus dilalui untuk kenaikan jenjang dan pangkat," jelas Ali.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan, mengapresiasi langkah sosialisasi ini sebagai pedoman penting bagi JFT Pembina Keamanan Pemasarakatan dan Pengaman Pemasarakatan. "Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas, sehingga proses pengajuan uji kompetensi berjalan lancar dan pegawai mampu meningkatkan kualitas kinerjanya," ungkapnya.

Dengan pedoman yang jelas, para petugas pemasarakatan diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, dan mendukung terciptanya sistem pemasarakatan yang lebih profesional dan humanis.

Rutan Praya, bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan lainnya, terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang berfokus pada pembinaan dan keamanan.(Adb)